

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah	:	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Urusan	:	1. Sosial 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tugas	:	Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Ditugaskan Kepada Daerah
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Ditugaskan Kepada Daerah</li> <li>2. Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Di Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan, Jaminan Sosial Dan Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Serta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</li> <li>3. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan, Jaminan Sosial Dan Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Serta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</li> <li>4. Pembinaan Dan Fasilitasi Kebijakan Di Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan, Jaminan Sosial Dan Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Serta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</li> <li>5. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan, Jaminan Sosial Dan Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Serta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</li> <li>6. Pelaksanaan Fungsi Kesekretariatan Dinas</li> <li>7. Pengendalian Penyelenggaraan Tugas UPTD dan</li> <li>8. Pelaksanaan Fungsi Kedinasan Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan, Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.</li> </ol>

## 1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>				
1.	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan	1.	Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	<p>Alasan Pemilihan Indikator : <b>Indikator ini dipilih untuk mengetahui Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b></p> <p>Formulasi Pengukuran : <math>\frac{\text{Jumlah PMKS/PPKS yang mendapatkan penanganan}}{\text{Jumlah PMKS/PSKS}} \times 100</math></p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>PD Penanggung Jawab : DINSOS PPPA</p> <p>Sumber Data : DINSOS PPPA</p>
2.	Meningkatkan peran PSKS dalam pelayanan Sosial	1.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	<p>Alasan Pemilihan Indikator : <b>Indikator ini dipilih untuk mengetahui Persentase peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan sosial</b></p> <p>Formulasi Pengukuran : <math>\frac{\text{Jumlah PSKS yang aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100</math></p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>PD Penanggung Jawab : DINSOS PPPA</p> <p>Sumber Data : DINSOS PPPA</p>
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak</b>				
1.	Meningkatnya ketercapaian program dan kegiatan yang responsif gender dan partisipasi perempuan dalam ranah publik (Ekonomi, sosial dan Politik)	1.	Persentase perempuan di lembaga pemerintahan	%	<p>Alasan Pemilihan Indikator : <b>Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan</b></p> <p>Formulasi Pengukuran : <math>\frac{\text{Jumlah Perempuan di lembaga Pemerintahan Kab. Banjarnegara}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan Kab Banjarnegara}} \times 100</math></p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>PD Penanggung Jawab : DINSOS PPPA</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
				Sumber Data	: DINSOS PPPA, BKD, DISNAKER, BPS
2.	Mewujudkan kabupaten layak anak	1. Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA)	PREDIKAT	Alasan Pemilihan Indikator	: <b>Indikator ini dipilih untuk mengetahui penghargaan yang diterima dari penilaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banjarnegara</b>
				Formulasi Pengukuran	: Penghargaan yang diterima
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
3	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu	1. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	Alasan Pemilihan Indikator	: <b>Indikator ini dipilih untuk mengetahui rasio perempuan yang mengalami kekerasan dengan jumlah penduduk perempuan (salah satu indikator IKK Outcome LPPD)</b>
				Formulasi Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100$
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA,
				Sumber Data	: DINSOS PPPA, DINDUKCAPIL
4	Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu	1. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	%	Alasan Pemilihan Indikator	: <b>Indikator ini dipilih untuk mengetahui Presentase anak yang mengalami kekerasan dengan jumlah anak kurang dari 18 tahun (salah satu indikator IKK Outcome LPPD)</b>
				Formulasi Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 100$
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA, DINDUKCAPIL

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya kinerja instansi Pemerintah</b>				
1.	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	1. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	%	Alasan Pemilihan Indikator	: <b>Indikator ini dipilih untuk mengetahui nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</b>
				Formulasi Pengukuran	: Kategori penilaian atas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik</b>				
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	1. Nilai Angka SKM	Angka	Alasan Pemilihan Indikator	: <b>Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarakat</b>
				Formulasi Pengukuran	: $\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA

## 2. Indikator Program

NO	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan</b>				
1.	Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Alasan Pemilihan Indikator	: Merupakan Indikator SPM
				Formulasi Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar yang memerlukan rehabilitasi sosial di luar panti}} \times 100$
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
		2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi	%	Alasan Pemilihan Indikator	: Merupakan indikator SPM



NO	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
		terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota		Formulasi Pengukuran	: Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan sosialnya ..... X 100
					Populasi Korban Bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Persentase Keluarga miskin dan rentan yang diintervensi dengan program bantuan sosial	%	Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengetahui presentase jumlah PMKS/PSKS khususnya masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan intervensi bantuan sosial
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah penduduk miskin dan rentan yang diintervensi dengan program bantuan sosial ..... X 100
					Jumlah penduduk miskin dan rentan
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>2.</b>	<b>Meningkatkan peran PSKS dalam pelayanan Sosial</b>				
1.	Program Pemberdayaan Sosial	1.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial	%	Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengetahui Persentase Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah PSKS Yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi ..... X 100
					Jumlah PSKS
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA

NO	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN																
1	2	3	4	5																
<b>3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>																			
1.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.	Presentase taman makam pahlawan dan monumen yang terpelihara dengan baik	%	<table border="1"> <tr> <td>Alasan Pemilihan Indikator</td> <td>:</td> <td>Untuk mengetahui persentase TMP dan monumen yang terpelihara dengan baik</td> </tr> <tr> <td>Formulasi Pengukuran</td> <td>:</td> <td> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan dan monumen yang terpelihara dengan baik}}{\text{Jumlah TMP dan Monumen}} \times 100</math> </td> </tr> <tr> <td>Tipe Perhitungan</td> <td>:</td> <td>Non Kumulatif</td> </tr> <tr> <td>PD Penanggung Jawab</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA</td> </tr> <tr> <td>Sumber Data</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA</td> </tr> </table>	Alasan Pemilihan Indikator	:	Untuk mengetahui persentase TMP dan monumen yang terpelihara dengan baik	Formulasi Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan dan monumen yang terpelihara dengan baik}}{\text{Jumlah TMP dan Monumen}} \times 100$	Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif	PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA	Sumber Data	:	DINSOS PPPA
Alasan Pemilihan Indikator	:	Untuk mengetahui persentase TMP dan monumen yang terpelihara dengan baik																		
Formulasi Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan dan monumen yang terpelihara dengan baik}}{\text{Jumlah TMP dan Monumen}} \times 100$																		
Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif																		
PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA																		
Sumber Data	:	DINSOS PPPA																		
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya ketercapaian program dan kegiatan yang responsif gender dan partisipasi perempuan dalam ranah publik</b>																			
1.	Program Pengarusutamaan gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	1.	Persentase Anggaran responsif gender dalam APBD	%	<table border="1"> <tr> <td>Alasan Pemilihan Indikator</td> <td>:</td> <td>Salah satu indikator IKK Outcome LPPD</td> </tr> <tr> <td>Formulasi Pengukuran</td> <td>:</td> <td> <math display="block">\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100</math> </td> </tr> <tr> <td>Tipe Perhitungan</td> <td>:</td> <td>Non Kumulatif</td> </tr> <tr> <td>PD Penanggung Jawab</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA</td> </tr> <tr> <td>Sumber Data</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA, Seluruh OPD di Kabupaten Banjarnegara</td> </tr> </table>	Alasan Pemilihan Indikator	:	Salah satu indikator IKK Outcome LPPD	Formulasi Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100$	Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif	PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA	Sumber Data	:	DINSOS PPPA, Seluruh OPD di Kabupaten Banjarnegara
Alasan Pemilihan Indikator	:	Salah satu indikator IKK Outcome LPPD																		
Formulasi Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100$																		
Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif																		
PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA																		
Sumber Data	:	DINSOS PPPA, Seluruh OPD di Kabupaten Banjarnegara																		
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.	Persentase Kelompok Perempuan Rentan yang Terbentuk	%	<table border="1"> <tr> <td>Alasan Pemilihan Indikator</td> <td>:</td> <td>Melanjutkan target Pembentukan Kelompok Perempuan Rentan di setiap desa/kelurahan yang baru terbentuk 23,7 % dari 278 desa/kelurahan</td> </tr> <tr> <td>Formulasi Pengukuran</td> <td>:</td> <td> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Kelompok Perempuan rentan yang terbentuk}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan di Kab. Banjarnegara}} \times 100</math> </td> </tr> <tr> <td>Tipe Perhitungan</td> <td>:</td> <td>Kumulatif</td> </tr> <tr> <td>PD Penanggung Jawab</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA</td> </tr> <tr> <td>Sumber Data</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA</td> </tr> </table>	Alasan Pemilihan Indikator	:	Melanjutkan target Pembentukan Kelompok Perempuan Rentan di setiap desa/kelurahan yang baru terbentuk 23,7 % dari 278 desa/kelurahan	Formulasi Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Perempuan rentan yang terbentuk}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan di Kab. Banjarnegara}} \times 100$	Tipe Perhitungan	:	Kumulatif	PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA	Sumber Data	:	DINSOS PPPA
Alasan Pemilihan Indikator	:	Melanjutkan target Pembentukan Kelompok Perempuan Rentan di setiap desa/kelurahan yang baru terbentuk 23,7 % dari 278 desa/kelurahan																		
Formulasi Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Perempuan rentan yang terbentuk}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan di Kab. Banjarnegara}} \times 100$																		
Tipe Perhitungan	:	Kumulatif																		
PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA																		
Sumber Data	:	DINSOS PPPA																		
		2.	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB	%	<table border="1"> <tr> <td>Alasan Pemilihan Indikator</td> <td>:</td> <td>Sinkronisasi dengan sasaran strategis kementerian PPPA</td> </tr> <tr> <td>Formulasi Pengukuran</td> <td>:</td> <td> <math display="block">\frac{\text{Jumlah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan di Kab. Banjarnegara}} \times 100</math> </td> </tr> </table>	Alasan Pemilihan Indikator	:	Sinkronisasi dengan sasaran strategis kementerian PPPA	Formulasi Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan di Kab. Banjarnegara}} \times 100$									
Alasan Pemilihan Indikator	:	Sinkronisasi dengan sasaran strategis kementerian PPPA																		
Formulasi Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan di Kab. Banjarnegara}} \times 100$																		

NO	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR		SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	
						Jumlah Desa/ Kelurahan di Kab. Banjarnegara
					Tipe Perhitungan	: Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
3.	Program Pengelolaan Sistem data gander	1.	Pesentase ketersediaan data berbasis gender di perangkat daerah	%	Alasan Pemilihan Indikator	: Untuk mengetahui pemenuhan terhadap data berbasis gender dari Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Banjarnegara
					Formulasi Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan data pilah gender/SIGA}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>5.</b>	<b>Mewujudkan Kabupaten Layak Anak</b>					
1	Program Pemenuhan Hak Anak	1.	Persentase Desa dan Kelurahan Layak Anak	%	Alasan Pemilihan Indikator	: Untuk mendukung penilaian Kabupaten layak Anak
					Formulasi Pengukuran	: $\frac{\text{Desa/Kelurahan Layak Anak}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$
					Tipe Perhitungan	: Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>6.</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO</b>					
1.	Program Perlindungan Perempuan	1.	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu	%	Alasan Pemilihan Indikator	: Merupakan Indikator IKK Output LPPD
					Formulasi Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah Pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan/laporan yang masuk}} \times 100$
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA

NO	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN		
1	2	3	4	5		
<b>6.</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>					
1.	Program perlindungan khusus anak	1.	Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu	%	Alasan Pemilihan Indikator	: Merupakan Indikator IKK Output LPPD
					Formulasi Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah Pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan/laporan yang masuk}} \times 100$
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>7</b>	<b>Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat</b>					
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator dipilih untuk mengetahui capaian indikator penunjang peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
					Formulasi Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah Penunjang Urusan daerah yang telaksana}}{\text{Jumlah Penunjang urusan daerah yang ada}} \times 100$
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA

### 3. Indikator Kegiatan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN																
1	2	3	4	5																
<b>1.</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>																			
1.	Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	1.	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	<table border="1"> <tr> <td>Alasan Pemilihan Indikator</td> <td>:</td> <td>Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</td> </tr> <tr> <td>Formulasi Pengukuran</td> <td>:</td> <td>Total Keseluruhan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi di Luar Panti Sosial</td> </tr> <tr> <td>Tipe Perhitungan</td> <td>:</td> <td>Non Kumulatif</td> </tr> <tr> <td>PD Penanggung Jawab</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA</td> </tr> <tr> <td>Sumber Data</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA</td> </tr> </table>	Alasan Pemilihan Indikator	:	Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Formulasi Pengukuran	:	Total Keseluruhan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi di Luar Panti Sosial	Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif	PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA	Sumber Data	:	DINSOS PPPA
Alasan Pemilihan Indikator	:	Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																		
Formulasi Pengukuran	:	Total Keseluruhan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi di Luar Panti Sosial																		
Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif																		
PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA																		
Sumber Data	:	DINSOS PPPA																		
2.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial PMKS) Lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	2.	Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA	Orang	<table border="1"> <tr> <td>Alasan Pemilihan Indikator</td> <td>:</td> <td>Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA</td> </tr> <tr> <td>Formulasi Pengukuran</td> <td>:</td> <td>Total Keseluruhan PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</td> </tr> <tr> <td>Tipe Perhitungan</td> <td>:</td> <td>Non Kumulatif</td> </tr> <tr> <td>PD Penanggung Jawab</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA</td> </tr> <tr> <td>Sumber Data</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA</td> </tr> </table>	Alasan Pemilihan Indikator	:	Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA	Formulasi Pengukuran	:	Total Keseluruhan PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif	PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA	Sumber Data	:	DINSOS PPPA
Alasan Pemilihan Indikator	:	Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA																		
Formulasi Pengukuran	:	Total Keseluruhan PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya																		
Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif																		
PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA																		
Sumber Data	:	DINSOS PPPA																		
<b>2.</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>																			
1.	Kegiatan Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	1.	Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Orang	<table border="1"> <tr> <td>Alasan Pemilihan Indikator</td> <td>:</td> <td>Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota</td> </tr> <tr> <td>Formulasi Pengukuran</td> <td>:</td> <td>Jumlah total korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial</td> </tr> <tr> <td>Tipe Perhitungan</td> <td>:</td> <td>Non Kumulatif</td> </tr> <tr> <td>PD Penanggung Jawab</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA</td> </tr> <tr> <td>Sumber Data</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA</td> </tr> </table>	Alasan Pemilihan Indikator	:	Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Formulasi Pengukuran	:	Jumlah total korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif	PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA	Sumber Data	:	DINSOS PPPA
Alasan Pemilihan Indikator	:	Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota																		
Formulasi Pengukuran	:	Jumlah total korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial																		
Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif																		
PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA																		
Sumber Data	:	DINSOS PPPA																		
2	Kegiatan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	1.	Jumlah Kampung Siaga Bencana dan Tagana yang aktif dalam penanganan bencana	Orang	<table border="1"> <tr> <td>Alasan Pemilihan Indikator</td> <td>:</td> <td>Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah Kampung Siaga Bencana dan Tagana yang aktif dalam penanganan bencana</td> </tr> <tr> <td>Formulasi Pengukuran</td> <td>:</td> <td>Jumlah kampung siaga bencana dan Tagana yang berperan aktif dalam penanganan bencana</td> </tr> <tr> <td>Tipe Perhitungan</td> <td>:</td> <td>Kumulatif</td> </tr> </table>	Alasan Pemilihan Indikator	:	Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah Kampung Siaga Bencana dan Tagana yang aktif dalam penanganan bencana	Formulasi Pengukuran	:	Jumlah kampung siaga bencana dan Tagana yang berperan aktif dalam penanganan bencana	Tipe Perhitungan	:	Kumulatif						
Alasan Pemilihan Indikator	:	Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah Kampung Siaga Bencana dan Tagana yang aktif dalam penanganan bencana																		
Formulasi Pengukuran	:	Jumlah kampung siaga bencana dan Tagana yang berperan aktif dalam penanganan bencana																		
Tipe Perhitungan	:	Kumulatif																		

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR		SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>3</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>					
1	Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	1.	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata	Keluarga	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata sumbangan uang dan barang serta undian gratis berhadiah
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>4</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>					
1.	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	1	Jumlah PSKS dan masyarakat umum yang mendapatkan sosialisasi mekanisme pengumpulan sumbangan uang dan barang serta undian gratis berhadiah	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah PSKS dan masyarakat umum yang mendapatkan sosialisasi mekanisme pengumpulan sumbangan uang dan barang serta undian gratis berhadiah
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah PSKS dan Masyarakat umum yang mendapatkan sosialisasi
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1	Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>5</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>					
1	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	1	Jumlah taman makan pahlawan dan monumen yang mendapatkan perawatan dan pemeliharaan	TMP & Monumen	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah taman makan pahlawan dan monumen yang mendapatkan perawatan dan pemeliharaan
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah TMP dan monumen yang terpelihara dengan baik
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>6</b>	<b>Program Pengarusutamaan gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan</b>					
1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan	1	Jumlah OPD yang menyusun	OPD	Alasan Pemilihan	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah OPD yang

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR		SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	
	Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		PPRG		Indikator	menyusun PPRG
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah OPD yang menyusun PPRG
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Kegiatan Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah perempuan yang menjadi peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah perempuan yang menjadi peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah perempuan yang mendapatkan sosialisasi
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
3	Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kabupaten/Kota	1	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah Lembaga perempuan yang mendapatkan peningkatan kapaistas
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>					
1.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.	Jumlah Anggota Kelompok Perempuan Rentan yang mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas keluarga	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah Anggota Kelompok Perempuan Rentan yang mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas keluarga
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah anggota kelompok perempuan rentan peningkatan kapaistas
					Tipe Perhitungan	: Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Lembaga Yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Lembaga	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah Lembaga Yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
					Tipe Perhitungan	: Kumulatif
					PD Penanggung	: DINSOS PPPA

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN		
1	2	3	4	5		
				Jawab		
				Sumber Data	:	DINSOS PPPA
<b>8</b>	<b>Program Pengelolaan Sistem data gender</b>					
1	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah data gander dan anak yang tersedia di masing-masing OPD	OPD	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah Jumlah data gander dan anak yang tersedia di masing-masing OPD
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah OPD yang menyusun data gender dan anak
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>9</b>	<b>Program Pemenuhan Hak Anak</b>					
1	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan koordinasi Pelembagaan PHA	Lembaga	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan koordinasi Pelembagaan PHA
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi pelembagaan PHA
					Tipe Perhitungan.	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	Lembaga	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah lembaga yang mendapatkan pengutan dan pengembangan
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>10</b>	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>					
1	Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	1	Jumlah perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah perempuan yang mendaptakan pelayanan
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>11</b>	<b>Program perlindungan khusus anak</b>					
1	Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan pada pihak lingkup daerah	1	Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan pencegahan	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR		SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	
	kabupaten/kota		kekerasan terhadap anak			terhadap anak
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah Peserta sosialisasi
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota	1	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani sesuai standar	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani sesuai standar
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah Anak yang terlayani
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>12</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah dokumen yang tersusun
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan	Bulan	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah pembayaran administrasi keuangan
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
3	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	1	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Paket	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah pelayanan administrasi perkantoran
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah paket administrasi perkantoran yang terlaksana
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	1	Jumlah pengadaan	Unit	Alasan Pemilihan	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah pengadaan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR		SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah		Indikator	barang milik daerah
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah unit pengadaan barang milik daerah
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor	Laporan	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah laporan administrasi perkantoran yang tersusun
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Unit	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah unit barang milik daerah yang terawat dengan baik
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA

#### 4. Indikator Sub Kegiatan

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN															
1	2	3	4	5															
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial</b>																		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	<table border="1"> <tr> <td>Alasan Pemilihan Indikator</td> <td>:</td> <td>Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah</td> </tr> <tr> <td>Formulasi Pengukuran</td> <td>:</td> <td>Jumlah orang yang tercukupi kebutuhan permakanaannya</td> </tr> <tr> <td>Tipe Perhitungan</td> <td>:</td> <td>Non Kumulatif</td> </tr> <tr> <td>PD Penanggung Jawab</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA</td> </tr> <tr> <td>Sumber Data</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA</td> </tr> </table>	Alasan Pemilihan Indikator	:	Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah	Formulasi Pengukuran	:	Jumlah orang yang tercukupi kebutuhan permakanaannya	Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif	PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA	Sumber Data	:	DINSOS PPPA
Alasan Pemilihan Indikator	:	Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah																	
Formulasi Pengukuran	:	Jumlah orang yang tercukupi kebutuhan permakanaannya																	
Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif																	
PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA																	
Sumber Data	:	DINSOS PPPA																	
2	Sub Kegiatan Penyediaan sandang	1. Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	<table border="1"> <tr> <td>Alasan Pemilihan Indikator</td> <td>:</td> <td>Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah</td> </tr> <tr> <td>Formulasi Pengukuran</td> <td>:</td> <td>Jumlah orang yang menerima pakaian dan perlengkapan lainnya</td> </tr> <tr> <td>Tipe Perhitungan</td> <td>:</td> <td>Non Kumulatif</td> </tr> <tr> <td>PD Penanggung Jawab</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA</td> </tr> <tr> <td>Sumber Data</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA</td> </tr> </table>	Alasan Pemilihan Indikator	:	Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah	Formulasi Pengukuran	:	Jumlah orang yang menerima pakaian dan perlengkapan lainnya	Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif	PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA	Sumber Data	:	DINSOS PPPA
Alasan Pemilihan Indikator	:	Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah																	
Formulasi Pengukuran	:	Jumlah orang yang menerima pakaian dan perlengkapan lainnya																	
Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif																	
PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA																	
Sumber Data	:	DINSOS PPPA																	
3	Sub Kegiatan Penyediaan alat bantu	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	<table border="1"> <tr> <td>Alasan Pemilihan Indikator</td> <td>:</td> <td>Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah</td> </tr> <tr> <td>Formulasi Pengukuran</td> <td>:</td> <td>Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu sesuai kebutuhannya</td> </tr> <tr> <td>Tipe Perhitungan</td> <td>:</td> <td>Non Kumulatif</td> </tr> <tr> <td>PD Penanggung Jawab</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA</td> </tr> <tr> <td>Sumber Data</td> <td>:</td> <td>DINSOS PPPA</td> </tr> </table>	Alasan Pemilihan Indikator	:	Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah	Formulasi Pengukuran	:	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu sesuai kebutuhannya	Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif	PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA	Sumber Data	:	DINSOS PPPA
Alasan Pemilihan Indikator	:	Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah																	
Formulasi Pengukuran	:	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu sesuai kebutuhannya																	
Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif																	
PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA																	
Sumber Data	:	DINSOS PPPA																	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	<table border="1"> <tr> <td>Alasan Pemilihan Indikator</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Formulasi</td> <td>:</td> <td>Jumlah orang yang</td> </tr> </table>	Alasan Pemilihan Indikator	:		Formulasi	:	Jumlah orang yang									
Alasan Pemilihan Indikator	:																		
Formulasi	:	Jumlah orang yang																	

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	
					Pengukuran	pelayanan reunifikasi keluarga
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
5	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	1	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah orang yang mendapatkan bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
6	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	1	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah orang yang mendapatkan bimbingan sosial keluarga
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
7	Sub Kegiatan Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
8	Sub Kegiatan Pemberian akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
9	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
10	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga	1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan rujukan	1 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>2</b>	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial PMKS) Lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial</b>				
1	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah orang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
		Kabupaten/Kota			Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
3	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	1 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah orang yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
4	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	1 Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
5	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga	1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesusi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran : Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga
				Tipe Perhitungan : Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab : DINSOS PPPA
				Sumber Data : DINSOS PPPA
6	Sub Kegiatan Pemberian layanan Reunifikasi Keluarga	1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga
				Tipe Perhitungan : Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab : DINSOS PPPA
				Sumber Data : DINSOS PPPA
7	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan
				Tipe Perhitungan : Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab : DINSOS PPPA
				Sumber Data : DINSOS PPPA
8	Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran : Jumlah dokumen perjanjian kerjasama antar lembaga
				Tipe Perhitungan : Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab : DINSOS PPPA

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>3</b>	<b>Kegiatan Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota</b>				
1	Sub Kegiatan Penyediaan makanan	1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah orang mendapatkan permakanan pada saat bencana baik alam maupun sosial
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah Orang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya pada saat bencana baik alam maupun sosial
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
3	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah tempat Pengungsian yang tersedia
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
4	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok	Orang	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
		Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan pada saat bencana baik alam maupun sosial
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
5	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	1 Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>4</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota</b>				
1	Sub Kegiatan Koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana	1 Jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	KSB	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
				Tipe Perhitungan	: Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Sub Kegiatan Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1 Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
		Kabupaten/Kota			Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>5</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan daerah</b>				
1	Sub Kegiatan Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	1 Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota yang didata	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah yang terdata
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Sub Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	1 Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah Keluarga yang mendapatkan program Pengentasan Fakir Miskin
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan fasilitasi

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
					bantuan sosial keluarga
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1 Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah orang yang Mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>				
1	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang	1 Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Dokumen	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>7</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>				
1	Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	1 Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	
						Masyarakat
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan potensi Tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
4	Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
5	Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>8</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten /Kota</b>				
1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah makam yang terpenuhi pemelihara dengan baik
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>9</b>	<b>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perumusan kebijakan Pelaksanaan PUG	1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
3	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	1	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
					Tipe Perhitungan	: Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
4	Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	1	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>10</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
1	Sub Kegiatan Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik hukum, sosial, dan ekonomi	1	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>11</b>	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota</b>				
1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>12</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah Laporan Pengembangan

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN		
1	2	3	4	5		
					Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif	
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA	
				Sumber Data	: DINSOS PPPA	
<b>13</b>	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	
				Tipe Perhitungan	: Kumulatif	
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA	
				Sumber Data	: DINSOS PPPA	
2	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif	
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA	
				Sumber Data	: DINSOS PPPA	
<b>14</b>	<b>Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Dokumen	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
					Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>15</b>	<b>Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
1	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>16</b>	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas Hidup Anak
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>17</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					
1	Sub Kegiatan Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	1	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pengaduan
					Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
					Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>19</b>	<b>Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan pada pihak lingkup daerah kabupaten/kota</b>					
1	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
					Formulasi Pengukuran	: Jumlah Perangkat Daerah yang

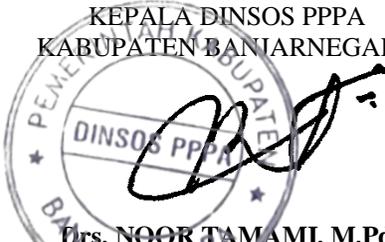
NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN		
1	2	3	4	5		
					mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif	
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA	
				Sumber Data	: DINSOS PPPA	
<b>20</b>	<b>Kegiatan Penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	1	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan	
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif	
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA	
				Sumber Data	: DINSOS PPPA	
<b>21</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
1	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif	
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA	
				Sumber Data	: DINSOS PPPA	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil VeriFikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
					dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>22</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>23</b>	<b>Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah</b>				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi	: Jumlah paket peralatan

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
				Pengukuran	dan perlengkapan kantor yang disediakan
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>24</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
1	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Alasan Pemilihan Indikator	: Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>25</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	Laporan	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
<b>26</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
				Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: DINSOS PPPA
				Sumber Data	: DINSOS PPPA
2	Sub Kegiatan	1	Jumlah gedung kantor dan	Unit	Alasan : Sesuai Keputusan

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN		
1	2	3	4	5		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Pemilihan Indikator	:	Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	:	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
				Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA
				Sumber Data	:	DINSOS PPPA
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara atau direhabilitasi	Unit	Pemilihan Indikator	:	Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
				Formulasi Pengukuran	:	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara atau di rehabilitasi
				Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab	:	DINSOS PPPA
				Sumber Data	:	DINSOS PPPA

KEPALA DINSOS PPPA  
 KABUPATEN BANJARNEGARA  
  
**Drs. NOOR TAMAMI, M.Pd**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19630212 198803 1 010